

PEMBANGUNAN PARIWISATA BUDAYA

(Studi Kasus di Tana Toraja)

Ruth Rinda, Andi Hasbi

Akademi Pariwisata Makassar

ruthrinda@yahoo.com, hasbiandipoke@gmail.com

ABSTRACT

Cultural tourism as tourism brand in Tana Toraja on its development is not running well. The government as is considered as the umbrella of the culture in one side, is also considered had marginalized the community. The efforts to foster and develop tourism nationally are also aimed at improving the quality of the country's culture, introducing the heritage of the nation as well as natural scenery, including maritime nature in various parts of the country in Indonesia. based on this, tourism management and development needs to be improved for the community.

Kata Kunci : *Tourism, Culture brand, Community role*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan jenis industry baru yang dapat membantu percepatan tumbuhnya perekonomian dan peningkatan penghasilan, standar hidup, penyediaan lapangan kerja, serta mengstimulasi bidang-bidang produktif lainnya. Sebagai jenis industri yang kompleks,, parawisata juga membantu industri-industri klasik seperti industry handmade dan cinderamata, bisnis transportasi dan penginapan secara

ekonomis juga dipandang sebagai industry.

Sekarang ini minat wisatawan domestic terutama dari kota-kota besar dan wisatawan international terhadap wisata budaya terus meningkat. Hal ini terjadi karena mereka ingin mendapatkan pengalaman yang lain dari kehidupan di kota setiap atau juga ada yang ingin bernostalgia. Peningkatan minat wisatawan internasional terhadap

wisata budaya dan produk wisata lainnya tampak dalam peningkatan wisatawan yang tujuannya ingin mengunjungi daerah-daerah yang mempunyai keunikan yang menarik dan memiliki fasilitas yang memadai bagi pengunjung yang datang ke tempat tersebut.

Sektor pariwisata juga mampu mengembangkan sokongan bagi kemajuan pembangunan daerah seperti pembangunan dermaga (laut dan udara), perbaikan jalan, sistem transportasi setempat, program-program kesehatan atau kebersihan, ujung tombak pengembangan sarana lingkungan dan budaya, dan lainnya, itu semua mampu menimbulkan feedback yang positif bagi warga masyarakat yang ada di lingkup daerah pengembangan pariwisata tersebut maupun bagi wisatawan luar.

Pariwisata dalam negeri khususnya yang ada di daerah-daerah Indonesia, selain untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, juga terus diarahkan dan dikembangkan guna memupuk rasa kebersamaan dan cinta tanah air serta menanamkan semangat dan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Pariwisata dapat digolongkan sebagai ilmu, sebab pariwisata merupakan kegiatan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memiliki latar

belakang, sejarah dan perkembangannya, membuka kesempatan alam pikiran dan observasi manusia ke arah hidup materi dan manah (pikiran+perasaan) lebih luas. Disertai dengan penelitian data-data statistik dan ungkapan/penemuan baru, pariwisata sebagai ilmu tampil kedepan sebagai suatu kehadiran nyata/hidup. Definisi, ungkapan dan penemuan harus ditambahkan untuk memperkaya, seperti ilmu-ilmu yang pada awalnya juga merupakan gejala yang tumbuh, dikembangkan, dianalisis dan didemonstrasikan sebagai ilmu.

Upaya pembinaan dan pengembangan kepariwisataan secara nasional ditujukan pula guna peningkatan kualitas budaya negeri, mengenalkan peninggalan sejarah bangsa serta pemandangan alam termasuk alam bahari di berbagai pelosok tanah air di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan dan pengembangan wisata perlu ditingkatkan bagi masyarakat.

Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai berbagai cagar budaya baik tangible maupun intangible. Budaya tangible tersebut seperti pemukiman tradisional dengan tongkonan, liang, alang, dan

rante, sementara budaya intangible seperti upacara-upacara misalnya upacara pentahbisan tongkonan (Rambu Tuka'), atau upacara kematian (Rambu Solo'). Tongkonan-tongkonan tersebut seperti Kande Api, Tangke Allo, Palawa, Nanggala, Kete'Kesu, dan Buntu Pune. Kabupaten Toraja Utara juga memiliki berbagai situs kubur yang sangat terkenal seperti Londa, selain pemukiman tradisional dengan dimensi-dimensinya. Di antara tongkonan-tongkonan tersebut, yang dibahas dalam tulisan ini yaitu tongkonan Kande Api. Tongkonan Kande Api terpilih menjadi pokok bahasan disebabkan kondisi tongkonan itu sekarang terlihat mengalami "penyimpangan" dalam pemanfaatannya. "penyimpangan" dalam pemanfaatannya tersebut akan dapat sangat mempengaruhi pelestarian tongkonan. Pelestarian dalam Bab I Ketentuan Umum ps 1 butir 22 UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya didefinisikan sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya, dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.

Tongkonan Kande Api secara administrasi berada di Kampung Kande Api Utara, Desa Buntu Barana, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja

Utara. Letak astronomis Kande Api berada pada koordinat 02056' 113" LS 1190 53' 47,3" BT, pada ketinggian 871 m dari permukaan laut. Seperti halnya tongkonan yang lain, tongkonan Kande Api termasuk dalam kategori living heritage. Tongkonan sebagai living heritage tetap eksis hingga kini bersama dengan masyarakat pendukungnya yang kuat mempertahankan budaya yang dimiliki, diantaranya ajaran Aluk Todolo. Dalam ajaran itu terkandung konsep kepercayaan terhadap alam kehidupan sesudah mati. Dengan demikian, pelestarian dan pengembangannya cenderung menjadi tanggung jawab masyarakat pemiliknya. Warisan budaya Toraja karena keunikan dan keeksotisannya telah menarik minat banyak orang, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari manca negara. Oleh karena itu, budaya Toraja menjadi objek wisata andalan terutama untuk wilayah timur Indonesia.

Budaya Toraja sebagai sebuah warisan leluhur yang memiliki makna dan nilai-nilai yang bersifat estetis, ekonomik dan simbolik. Nilai estetika dan artistik dapat diperhatikan tanpa melihat dimensi waktu, oleh sebab itu, warisan budaya indonesia mampu menjadi sebuah objek wisata. keadaan seperti kondisi tersebut, terlihat pula

pada di daerah kampung Kande Api. Pemanfaatan budaya Toraja yang berasal dari warisan budaya leluhur, secara khusus pada budaya tongkonan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi budaya itu sendiri, bagi lingkungan, serta untuk masyarakat. Pengaruh tersebut mampu menjadi positif, tetapi mampu pula menjadi negatif. Dalam artian yaitu bila wasatawan memanfaatkan suatu objek wisata tentunya dapat memberi pengaruh yang buruk, atau pengaruh yang baik bagi budaya itu sendiri.

Budaya leluhur yang dijadikan sebagai daya tarik dan menjadi wadah pariwisata mempunyai nilai ekonomi disebabkan dapat mengembangkan wadah pekerjaan yang baru untuk warga setempat. Kemudian budaya leluhur itu nantinya dapat memberikan manfaat yang bernilai sebagai anggaran bagi pemeliharannya. Fenomena itu disebabkan posisi budaya leluhur tersebut sebagai aset pariwisata, sedangkan pengaruh negatif juga lebih banyak dibandingkan dengan pengaruh positif. Pengaruh negatif yang sering terjadi seperti pengaruh pencemaran bagi warisan budaya itu sendiri dan lingkungan setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa implementasi

pariwisata budaya, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan kritik terhadap pariwisata budaya.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pariwisata

Istilah pariwisata secara nasional dimulai sekitar awal tahun 1960-an yang diperoleh melalui cendikia budaya atas permintaan Presiden Soekarno kepada Sri Sulta Hamengku Buwono IX, selaku ketua DTI (Dewan Tourisme Indonesia). Kedua cendikiawan tersebut yaitu Priyono dan Mr. Moh. Yamin, yang mendefenisikan pariwisata untuk mengganti arti *tourism* atau travel, yang arti konotasinya sangat bias terkait dengan selera rasa *excitement*, *entertainment*, *preasure*, dan sejenisnya.

Dengan lahirnya istilah Pariwisata, maka Dewan Tourisme Indonesia (DTI) resmi tampil dengan nama Dewan Pariwisata Indonesia (Depari) pada tanggal 16 Agustus 1961. Pengembangan pariwisata di Indonesia perlu ditangani secara serius mengingat pariwisata salah satu sektor penting untuk meraih devisa lebih banyak.

Pembatasan sebagaimana di atas begitu luas, sehingga defenisi pariwisata seperti sulit untuk bisa “dibatasi” sebab

berkaitan pada semua aspek kehidupan. Karena begitu luasnya, sehingga ada yang menjelaskan bahwa segala sesuatunya adalah pariwisata, *tourism is everything and everything is tourism* (Ian Mut 1994:104).Pariwisata meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan orang dalam waktu yang sementara dan singkat pada suatu tempat tujuan yang bukan tempat mereka bekerja dan tinggal, dengan kegiatan yang berlainan selama berada di tempat tujuan.

Pariwisata Budaya

Konsep pariwisata yang dikonsepsikan disini adalah yang disesuaikan dengan Perda No. 3 tahun 1991 tentang pariwisata Budaya yaitu sebagai salah satu jenis pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktor-faktor kebudayaan Tana Toraja yang di jiwai oleh agama Kristen sebagai bagian dari kebudayaan Nasional, yang diharapkan adanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Konsepsi pariwisata budaya, menjadi harapan untuk dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan di antara penyelenggaraan aspek pariwisata dan kebudayaan di Tana Toraja. Daya tarik

wisata dan mutu objek nantinya mampu dikembangkan serta tetap lestari, dan mampu membentengi nilai dan norma budaya dari pengaruh yang bersifat negatif bagi aspek pariwisata. Hal ini terlihat sejalan dengan pandangan baru bagi pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada masyarakat yaitu keberlangsungan sumber daya alam dan masyarakat local dan terjadinya keseimbangan antara budaya dan sumber daya alam serta antara, kepuasan wisatawan dan kebahagiaan masyarakat lokal .

Pada saat perekonomian Dunia semakin maju, serta perhubungan sudah mampu menjangkau seluruh belahan bumi dengan lancer, maka hubungan antara bangsa kian intensif. Semakin banyak orang yang mampu bepergian keluar negeri untuk pesiar dan mencari pengalaman mengenai kebudayaan dunia, maka dengan demikian strategi pariwisata buda seperti ditetapkan di atas, menjadi pilihan yang tepat. Dengan demikian mudah dibayangkan bagaimana eratnya interaksi antara pariwisata dengan kebudayaan setempat. Sejauh ini interaksi ini mendatangkan banyak hal yang bagus buat pengembangan budaya Tana Toraja, terutama mengenai aspek ekonomi, itu

terlihat dari semakin bangkitnya kegiatan industry rakyat.

Indonesia dalam arti bangsa dan dalam arti wilayah Negara memang mempunyai keunikannya. Sebagai bangsa ia adalah memiliki keragaman budaya yang sangat menarik, untuk mengatakannya amat mengagumkan. Kehidupan yang bermacam-macam tersebut berhubungan dengan latar belakang adat istiadat, agama dan kesenian, yang sangat amat menari sebab setiap etnik (suku) mempunyai berbagai keunikan dan keindahan alam sendiri-sendiri, sedangkan sebagai wilayah Negara, alamnya amat kaya pula dengan kekhasannya masing-masing. Alam, gunung dan daratannya yang unik, bahkan di balik daerah yang gersang sekalipun, dengan demikian pula wilayah sungai-sungainya memiliki daya tarik sendiri-sendiri.

Teori Struktural Fungsional

Menurut Sanderson (1993:10), ciri pokok dari struktural fungsional adalah gagasan tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*soecietal needs*). Para penganut teori ini percaya bahwa masyarakat sangat serupa dengan organisasi biologis, karena mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus

dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan keberadaannya yang setidaknya dapat berfungsi dengan baik.

Teori fungsional menurut pandangan parsons dan para pengikutnya mempunyai landasan dan dasar sebagai berikut :

“(1) masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, (2) dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik, (3) sekalipun interaksi social tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental fungsi sosial selalu cenderung bergerak kearah equilibrium yang bersifat dinamis (4) sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusional. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi social pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai akan tetapi setiap system social akan berproses kearah itu, (5) perubahan-perubahan di dalam system social

pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian- penyesuaian dan tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur social budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan, (6) pada dasarnya, perubahan-perubahan timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan yaitu penyesuaian-penyusunan yang dilakukan oleh system tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar, pertumbuhan melalui proses diferensiasi structural dan fungsional, serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat, dan (7) faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu system social adalah konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu” (Nasikun, 1995:11-12).

Craib berpendapat (1986 : 65), pandangan Parsons menetapkan empat persyaratan fungsional yaitu (1) setiap system harus menyesuaikan diri dengan lingkungan (*adaptation*), (2) setiap system harus memiliki suatu alat untuk memobilisasi sumbernya supaya dapat

mencapai tujuan-tujuan dan dengan demikian mencapai gratifikasi (*goal attainment*), (3) setiap system harus mempertahankan koordinasi internal dari bagian-bagian dan membangun cara-cara yang berpautan dengan deviansi atau harus mempertahankan kesatuannya (*integration*), dan (4) setiap system harus mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang. Sejalan dengan pandangan di atas, di dalam setiap struktur social baru dapat berfungsi apabila (1) setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang secara relatif mantap dan stabil, (2) setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen – elemen yang terintegrasi dengan baik, (3) setiap elemen dalam suatu msyarakat mempunyai fungsi yakni memberikan sumbangan pada bertahannya masyarakat itu sebagai suatu system, dan (4) setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya.

Pandangan Talcontt Parsons tentang teori struktural fungsional hanya menjelaskan masyarakat sebagai suatu system dan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Serta hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut berfungsi

ganda dan timbal balik. Parsons tidak menjelaskan hubungan yang terjadi dalam pembangunan pariwisata. Dengan hal itu perlu dikemukakan pandangan Natori (2001 : 6) tentang pembangunan pariwisata. Dengan demikian, teori struktural fungsional sangat relevan digunakan untuk menganalisis pengelolaan objek wisata Tana Toraja.

Teori Tindakan Sosial

Menurut Parsons dalam teori dalam teori tindakan sosialnya adalah (1) tindakan itu diarahkan pada tujuannya (memiliki suatu tujuan), (2) tindakan terjadi dalam suatu situasi, dimana beberapa elemennya sudah pasti sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, (3) secara normatif tindakan ini diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Johnson juga menegaskan, komponen-komponen dasar suatu tindakan social adalah tujuan, alat, kondisi, dan norma. Alat dan kondisi berbeda dalam hal ini orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat dalam usahanya mencapai tujuan, kondisi merupakan aspek situasi yang tidak dapat dikontrol oleh orang yang bertindak itu. Banyak orang mengenal tindakannya sendiri mempunyai tujuan yang diatur secara normatif dan banyak

pula yang mengakui situasi dimana tindakan itu terjadi juga penting.

Teori Parsons mengenai tindakan social menekankan orientasi subyektif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu. Pilihan-pilihan ini secara pilihan-pilihan individu. Pilihan-pilihan ini secara normative diatur atau dikendalikan oleh nilai dan standar normatif bersama (Johnson, 1986 : 113). Menurut Ritzer (1992 : 56-58) Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan social dengan karakteristik yaitu (1) adanya individu selaku aktor, (2) aktor mempunyai alternatif cara, alat secara teknik untuk mencapai tujuannya, (3) aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan dan (4) aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak dan mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Ritzer juga menyimpulkan, bahwa tindakan social merupakan suatu proses yaitu aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih yang semuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh system

kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai social.

Pandangan Weber (Campbell, 1994 : 199), melalui analisis atas berbagai macam tindakan manusia kita memperoleh pengetahuan mengenai ciri-ciri dan keanekaragaman masyarakat-masyarakat manusia. Sebagaimana pandangan tersebut di atas, teori tindakan social dapat membantu dalam menganalisis pengembangan pariwisata domestik di Tana Toraja.

Teori Kritis

Teori kritis menurut salah seorang pendirinya yang bernama Mz Horkheimer bahwa teori-teori tradisional dianggap gagal menjadi teori emansipatoris. Teori kritis tidak lagi menghiraukan dengan prinsip-prinsip umum dalam membangun pengetahuan yang kukuh dan tertutup pada dirinya sendiri, seperti dilakukan oleh teori tradisional. Tujuan teori kritis yakni memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat rasional dan, dengan demikian, memberikan pula kesadaran untuk pembangunan membangun masyarakat rasional tempat manusia dapat memuaskan semua kebutuhan dan kemampuannya. Horkheimer menulis,

teori kritis semua unsur hakiki dalam usaha sejarah manusia untuk menciptakan suatu dunia yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan kekuatan-kekuatan manusia, tujuannya yakni pembebasan manusia dari perbudakan. Teori kritis ingin membebaskan masyarakat dari keadaan yang irasional di zaman ini dan ingin menjadi teori emansipatoris.

Horkheimer yakni teori kritis akan menjadi teori emansipatoris karena sifat dan cirinya : (1) curiga dan kritis terhadap masyarakat, (2) berfikir secara historis, atau berpijak pada masyarakat dalam prosesnya yang historis, yakni masyarakat yang totalitasnya, dan ketiga menjadikan totalitas itu sebagai kerangka, yakni berfikir dalam kontradiksi.

Dalam kenyataannya teori kritis hampir selalu dihubungkan dengan keberadaan sekolah Frankfurt (Institusi for Sozialforschung) di Frankfurt am Main, yang berdiri pada tahun 1923 dengan pelopor Felix J. Weil. Cara pemikiran sekolah ini disebutnya sendiri Teori Kritik Masyarakat (eine Kritische Theorie der Gessellschaft).

Pada dasarnya pemikiran teori kritis bersumber pada empat kekuatan yaitu marxisme sebagai titik tolaknya,

perspektif idealisme Jerman yang dirintis oleh Immanuel Kant, ajaran Hegel (dialektika), dan ajaran Freud. Para anggota pertama di sekolah ini adalah Friedrich Pollock (ahli ekonomi), Theodor W. Adorno (musikus, ahli sastra, psikolog, filsuf), Herbert Marcuse (murid filsuf Martin Heidegger yang dikenal sebagai “nabi” *New Left* di Amerika), Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud), Karl August Wittfogel (ahli sinologi), Franz Neumann dan Otto Kirchheimer (ahli-ahli hukum), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (kritikus sastra), Max Horkheimer (filsuf). Jürgen Habermas dan Alfred Schmidt masuk belakangan.

Meskipun bertitik tolak dari ilham dasar Karl Marx, teori kritis yang ditujukan untuk membebaskan manusia dan pemanipulasian para teknokrat modern itu mampu melampaui dan meningkatkan Marx sendiri dan menghadapi masalah-masalah industri maju secara baru dan kreatif.

Teori kritis memandang diri sebagai pewaris cita-cita Karl Marx dan sebagai teori yang menjadi emansipatoris, yakni mengembalikan kemerdekaan dan masa depan manusia tetapi tidak “membebek” kepadanya.

Kelemahan banyak aliran Marxisme ialah bahwa mereka begitu saja menjiplak hasil-hasil analisis Marx dan menerapkan pada masyarakat sekarang. Padahal, masyarakat yang dinamis oleh Marx adalah masyarakat lebih dari 100 tahun yang lalu.

Teori kritis mengadakan analisis baru terhadap masyarakat yang dipahami sebagai “masyarakat kapitalis tua” “atau masyarakat industri maju”. Yang dihangatkan kembali dalam teori kritis bukan teori Marx yang usang melainkan maksud dasar Marx, yaitu pembebasan manusia dari segala belenggu, penghisapan, dan penindasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi budaya pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena desain penelitian yang dibuat tidaklah mengikat peneliti (elastis) sesuai dengan kondisi lapangan dan juga dianggap mampu mengeksplorasi lebih detail mengenai cara-cara orang berinteraksi dan bekerjasama dalam berkomunikasi melalui fenomena yang teramati dalam

kehidupan sehari-hari di lingkungan alamiah.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti merupakan instrument pokok sehingga peneliti bertindak proaktif secara langsung dalam mengumpulkan data dan pada tahap keandalan peran peneliti ikut serta dan terlibat dalam latar belakang penelitian. Penelitian berlangsung sesuai dengan kebutuhan peneliti sampai mencapai tingkat kejenuhan atau kemapanan data. Semua data hasil pengamatan berupa catatan dan rekaman proses akan dicek kembali atau di konfirmasi ulang kepada informan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah semua data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian, selanjutnya disimpulkan oleh peneliti sesuai teori yang relevan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskriptif dan pembahasan tentang hasil pengetesan konsep yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya, ini telah dianut sejak awal 1970-an bahkan sudah dituangkan ke dalam bentuk peraturan daerah (perda). Perda pariwisata budaya (perda 1/1991) menyiratkan hubungan timbal balik yang mutualistis antara pariwisata dan kebudayaan Tana Toraja. Interaksi antara pariwisata dan kebudayaan Tana Toraja diharapkan terjadi secara simetris dalam hubungan dinamik progresif. Artinya kumajuan pariwisata harus secara langsung memajukan kebudayaan Tana Toraja secara selaras, serasi dan seimbang.

Kebudayaan Tana Toraja adalah kebudayaan yang kental bernafaskan Kristen yang sudah menyatu dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan itu tumbuh dan berakar pada berbagai lembaga tradisional yang bersifat social religious seperti subak, dan desa adat dengan banjarnya. Lembaga-lembaga tradisional ini, disamping lembaga-lembaga lainnya, merupakan pilar-pilar penyangga kelestarian kebudayaan Tana Toraja. Ini berarti maju mundurnya kebudayaan Tana Toraja sangat tergantung pada dinamika lembaga-lembaga ini. Oleh karena kebudayaan Tana Toraja tergantung pada lembaga tradisional, sedangkan pariwisata tergantung pada kebudayaan, maka hal

ini langsung berarti bahwa pariwisata tergantung kepada eksistensi lembaga-lembaga tradisional tersebut.

Dengan logika di atas maka ada usaha-usaha nyata sektor pariwisata untuk memperkuat eksistensi lembaga-lembaga tradisional ini. Tetapi kenyataannya belum ada usaha-usaha nyata dari sektor pariwisata untuk memperkuat lembaga tradisional. Hubungan yang ada masih bersifat asimetris, dimana lembaga tradisional diakui peranannya dalam kepariwisataan, tetapi peranan tersebut lebih banyak memosisikan lembaga tradisional sebagai objek. Desa adat cenderung disterilkan, bahkan pada berbagai kasus terlihat bahwa desa adat dikastrasi. Kalau sudah ada masalah yang tidak dapat dipecahkan, barulah desa adat diminta aktif. Pada tingkat yang lebih ekstrim, lembaga tradisional di Tana Toraja mirip sapi perahan, yang diperah susunya setiap saat, tetapi sisapi sendiri tidak pernah menikmati hasilnya.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Konsep yang sama juga dikemukakan oleh Nasikun (1999 : 10) pembangunan pariwisata berbasis masyarakat memiliki cirri-ciri yang unik

yaitu (1) karakternyanya lebih mudah diorganisasikan ke dalam skala yang kecil, merupakan jenis pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif, (2) memiliki peluang yang mampu mengembangkan objek dan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil, oleh karena itu dapat oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial kultural yang minimal, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat, (3) memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat lokal untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan dan di dalam menikmati keuntungan pengembangan perkembangan industri pariwisata, dan oleh karena itu lebih membudayakan masyarakat, (4) tidak hanya menekankan “cultural sustainability” akan tetapi secara aktif bahkan berupaya membangkitkan penghormatan para wisatawan pada kebutuhan lokal.”

Natori (2001 : 5) mendefinisikan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*) sebagai aktivitas-aktivitas masyarakat lokal untuk mempromosikan keunggulan daerahnya dan menciptakan

sebuah komunitas yang dipenuhi kekuatan memanfaatkan secara penuh sumber daya alam, budaya, sejarah, industri, orang-orang berbakat, dan sumber-sumber daya lokal lainnya.

Menurut Ardika (2001 : 5) dalam makalahnya “Pembangunan Pariwisata Tana Toraja berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat menyebutkan pariwisata yang menyejahterakan masyarakat adalah pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan manusia menjadi sangat relevan untuk diprioritaskan, sebab masyarakat tidak hanya belajar keterampilan untuk pengelolaan berbagai usaha pariwisata tetapi juga penyuluhan, pelatihan, pendidikan public untuk memberikan pemahaman tentang lingkungan agar dengan pengetahuan tersebut mereka memahami fungsi ekologi dan akan menjadi pengendali bagi kelestarian lingkungannya sendiri. Pada bagian lain juga dikemukakan bahwa dalam pariwisata perlu adanya keterpaduan yakni (1) meningkatkan kerja sama dan upaya terpadu antara seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam membangun yang kondusif bagi kenyamanan, ketertiban,

keamanan, serta kelestarian objek dan daya tarik wisata, (2) mengembangkan kerja lintas regional dalam pengembangan asset kebudayaan dan pariwisata dalam konteks ekonomi daerah, (3) membangun kebudayaan dan pariwisata untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah terutama di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa, (4) pemerataan pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara spasial, sektoral, dan structural dengan aksentuasi pendekatan proses bottom up dan pelaksanaan otonomi daerah, (5) pengembangan forum komunikasi dan koordinasi antara stakeholders pembangunan dalam rangka penyalarsan visi, misi, dan pariwisata, (6) pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata, (7) pemberdayaan peran unsur swasta dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dan (8) peningkatan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam mendorong pelestarian dan pengembangan warisan budaya bangsa dan pemberdayaannya bagi pembangunan pariwisata.

Kritik Terhadap Pariwisata Budaya

Kalau konsep pariwisata budaya dilaksanakan secara konsisten, maka lembaga-lembaga tradisional seperti subak dan daerah adat harus berperan secara aktif, termasuk aktif di dalam menikmati manfaat pembangunan ekonomi kepariwisataan. Bukti-bukti empiris sebagaimana terlihat dari hasil penelitian di berbagai desa adat menunjukkan bahwa sesungguhnya desa adat mempunyai potensi yang memadai untuk mengelola objek wisata yang ada di daerahnya. Seperti apa yang telah diteliti oleh Sitawati dalam tesis yang berjudul “Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat bagi Desa Adat Beraban”, bahwa pengelolaan objek tersebut telah memberikan makna dalam pembangunan Desa adat, meliputi makna kesejahteraan, makna dalam hubungan sosial, dan makna dalam pelestarian budaya. Dalam hal kesejahteraan dengan hasil pengelolaan objek wisata desa adat telah mampu membangun Pura Desa dan melakukan Aci desa tanpa harus memungut dari warga desa. Di samping itu, warga setempat telah mendapat formal maupun nonformal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hubungan sosial, melalui asas kekeluargaan pengelolaan objek wisata telah memberikan pelayanan kepada

masyarakat, karyawan, dan pengunjung dengan melakukan berbagai usaha dan kegiatan bersama sehingga objek wisata menjadi nyaman, terpelihara, dan menyenangkan bagi pengunjung. Bagi pelestarian budaya, pengelolaan objek wisata telah memberikan 5% hasil pengelolaan Pura tanah lot dan pura-pura di sekitarnya. Dana tersebut telah dimanfaatkan untuk biaya upacara.

Konsep pariwisata budaya sudah merupakan konsep yang sangat tepat untuk diterapkan di Tana Toraja. Konsep ini telah di godok sejak tahun 1968 (seminar pariwisata Januari 1968), diputuskan tahun 1971/1972 dan direvisi kembali tahun 1991 (perda 3/1991). Akhirnya sampai kepada kesimpulan yang oleh banyak orang di anggap sebagai *the third way* yang manis. Konsep pariwisata ini sedikit kontradiktif, karena pariwisata budaya (*cultural tourism*) berarti menggunakan kebudayaan sebagai modal dasar pengembangan pariwisata. Ini berarti juga bahwa kebudayaan secara sadar di-ekspose kebudayaan menghadapi kebudayaan modern (budaya wisatawan), akan menyebabkan tergesernya kebudayaan tradisional, termakan gelombang budaya barat. Maka, ada kekhawatiran bahwa cepat atau lambat kebudayaan Tana Toraja

akan hanyut dalam derasnya budaya global. Di pihak lain, pariwisata budaya di artikan bahwa pariwisata harus mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Dalam kaitan ini, ada suatu obsesi bahwa perkembangan pariwisata akan sejalan dengan pembangunan kebudayaan.

Masalahnya perda pariwisata budaya lebih menekankan kepada hubungan antara kebudayaan dengan kepariwisataan. Kalau tujuannya untuk meningkatkan peran desa adat atau masyarakat lokal di dalam pembangunan (termasuk pembangunan kepariwistaan), maka yang harus dibenahi adalah system atau mekanisme umum yang berlaku untuk suatu proyek pembangunan. Artinya bagaimana mekanisme harus dibuat supaya desa adat dapat ikut menjadi *stakeholders* yang aktif dalam pengeluaran ijin prinsip, ijin mendirikan bangunan, ijin usaha, dan seterusnya. Dan tidak harus diborong semuanya oleh Peraturan daerah mengenai pariwisata budaya.

Selain itu pertanyaan yang juga sangat mendasar adalah tipe kepariwisataan yang akan dikembangkan di Tana Toraja. Kalau perda pariwisata budaya dihapus, lalu pariwisata apa yang mau dikembangkan Tana Toraja? Apa kita harus

mengembangkan pariwisata safari Kerbau (Tedong Bonga) atau pariwisata rekreasi, atau pariwisata judi, ataukah pariwisata seks (pitana, 2002 : 104).

Perda pariwisata budaya mungkin megandung beberapa kelemahan, ataukah pelaksanaannya, serta pelaksanaannya, serta pelaksanaannya di lapangan yang lebih lemah. Oleh karena itu, agar diusahakan dalam menyusun konsep aturan pelaksanaan ini sehingga konsep pariwisata budaya lebih implementatif. Jadi bukan mencabut Perda pariwisata budaya harus lebih di-*refocused*, atau *refined*. Pencabutan perda pariwisata budaya lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang manfaatnya.

Pariwisata budaya banyak dikritik Karena setidak-tidaknya ada tiga hal yang menjadi pemicunya (1) ketidakseimbangan (*imbalance*), ini artinya wisatawan bisa bersantai menikmati keindahan alam dan atraksi lainnya, sedangkan masyarakat lokal bekerja keras, adanya status yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi (2) bersifat temporal, artinya tidak ada hubungan batin antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal, pertemuan antara masyarakat lokal wisatawan hanya bersifat sementara yang sebatas mnyampaikan pesan (3)

factor ekonomi, artinya karena tidak ada hubungan batin antara pengunjung dengan masyarakat lokal sehingga segala sesuatu diukur dengan uang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pariwisata budaya akan berjalan dengan baik apabila pemerintah melibatkan masyarakat , sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan langsung dari pariwisata tersebut.
- b. Pariwisata budaya memiliki ciri khas budaya pariwisata Tana Toraja tidaklah dipandang semata-mata sebagai komoditas, namun yang lebih penting bagaimana melestarikan kebudayaan itu sendiri.
- c. Departemen terkait seperti Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah provinsi atau kota /kabupaten perlu merumuskan dengan jelas pariwisata budaya, sehingga tidak hanya sebagai wacana belaka. Serta Pariwisata Budaya khususnya di Kabupaten Tanah Toraja perlu mendapat perhatian lebih banyak dari para stake holder, pemerintah dan

masyarakat sekitar Tanah Toraja dalam pelestarian budaya tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Gede, 2001, *Pembangunan Pa
riwisata Bali Berkelanjutanyang
Berbasis Kerakyatan*, Naskah
lengkap Seminar Nasional Bali
The Last or The Lost Paradise,
Denpasar, 1 Desember
- Craib, 1986. *Teori-teori sosial Modern
dari Parsons Sampai Habermas*.
Jakarta: Rajawali
- Horkheimer, Max. 1992, *Critical Theory
-Selected Essays*, New York :
Continum Publishing Company.
- Johnson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik
dan Modern*. Jilid 1. PT
Gramedia: Jakarta
- Munt, Ian. (1994). *Eco-tourism or ego-
tourism? Race and Class*, 36(1),
49-60. Retrieved from
[http://search.proquest.com/
docview/1036444786?accountid=
13876](http://search.proquest.com/docview/1036444786?accountid=13876)
- Nasikun, J. 1999. “Globalisasi dan
Pembangunan Pariwisata
Berbasis Komunitas,” dalam
*Makalah Lokakarya Penataan
Pariwisata dalam Menyongsong
Indonesia Baru*,
Yogyakarta: Dewan Pariwisata
Nasional & Puspar UGM
- Natori, Masahito. 2001. *A Gudebook
For Tourism Based Community.
Development*. Aptec Osaka-
Japan.

Ritzer, George.1992. Teori Masyarakat Modern. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sanderson, Stephen K. 1993 Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Realita Sosial, Jakarta : Haji Masagung.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya